

KOMISI II BENTUK PANJA PEMINDAHAN IKN



sumber: kaltim.prokal.co

BALIKPAPAN, KALTIM POST - Pembahasan rancangan undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara (IKN) belum dibahas dengan DPR RI. Padahal peletakan batu pertama atau *groundbreaking* pada calon ibu kota anyar di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) bakal dilaksanakan pertengahan tahun ini. Walau begitu, Komisi II DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja) untuk penyusunan RUU pemindahan IKN ke Kaltim. Kendati begitu, panja yang dibentuk pada masa sidang II 2019-2020 ini belum fokus membahas tentang isu pemindahan IKN.

“Belum ada pembahasan mengenai itu. Masih menunggu perkembangan dari pemerintah,” kata Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur kepada *Kaltim Post* kemarin. Komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, lalu aparatur negara dan reformasi birokrasi, kemudian pemilihan serta pertanahan dan reforma agraria ini akan menggelar rapat internal pekan depan. Salah satunya membahas jadwal kegiatan Komisi II DPR RI pada masa persidangan kedua tahun 2019-2020 dan kunjungan kerja spesifik. “Jadi pembahasan mengenai RUU pemindahan IKN tunggu setelah itu. Sebab, akan ada pembahasan jadwal Komisi II,” terang politikus PKS ini. Khusus untuk kunjungan kerja spesifik, Aus akan menganjurkan menyambangi lokasi calon IKN baru. Untuk melihat langsung kesiapan dan kondisi wilayah pusat pemerintahan pengganti DKI Jakarta ini. Beberapa lalu, Komisi V, Komisi VI, dan Komisi VII telah melaksanakan kunjungan kerja

spesifik ke Balikpapan guna melihat kesiapan pemindahan IKN Ke Kaltim. “Insyaallah, akan saya usulkan hal itu,” janji wakil Kaltim di Senayan ini.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah berupaya menuntaskan naskah akademik RUU tentang IKN baru. Berdasar jadwal yang telah direncanakan, RUU tentang IKN baru akan diserahkan ke DPR RI untuk dibahas. Mengingat RUU tersebut telah diusulkan untuk masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. “Targetnya januari ini diserahkan ke DPR,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata saat dikonfirmasi *Kaltim Post* beberapa waktu. Selain itu merumuskan naskah akademik dan draft RUU tentang pemindahan IKN, Bappenas telah membereskan rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai badan otorita ibu kota (BOI). Dan telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara akhir Desember 2019 untuk diteruskan ke Presiden Joko Widodo. Jadi, bisa segera ditandatangani dan diterbitkan bulan ini. “Kita tunggu saja perpres yang mengatur badan otoritanya,” terang pria yang sempat menjabat staf ahli bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan Bappenas ini.

Dalam draft perpres mengenai BOI itu, berisi ketentuan yang menerangkan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. Di dalamnya juga mengatur tentang jabatan dewan pengawas sebagai auditor internal dan dewan pengarah untuk memastikan proses pemindahan ibu kota berjalan sesuai rencana. Penerbitan perpres mengenai BOI ini bisa dilakukan lebih cepat karena terpisah dengan UU tentang IKN baru, sehingga dapat terbit lebih dahulu. Sebelum pembahasan RUU mengenai pemindahan IKN antara pemerintah dan DPR. “Karena keduanya adalah peraturan yang berbeda, perpres tentang BOI bisa diterbitkan sebelum ada UU tentang IKN,” terang dia.

Nantinya BOI ini menjadi organisasi setingkat kementerian yang tugasnya mengurus proses pemindahan IKN. Menuju kawasan pemerintahan khusus yang statusnya akan dilakukan pembahasan dengan DPR RI. Apakah berbentuk provinsi atau hanya setingkat kota. Dalam kajian Bappenas, kepala BOI akan setingkat menteri yang akan ditunjuk setelah perpres terbentuk. “Jadi, siapa yang akan memimpin BOI, menunggu perpresnya terbit,” jelas Rudy. Palu penetapan ibu kota negara (IKN) ke Bumi Etam telah diketuk di sebagian wilayah PPU dan sebagiannya Kukar. Tiga kota besar: Samarinda, Balikpapan, dan Bontang bersiap menjadi penyangga. Dari ketiganya, Kota Tepian paling berisiko tertinggal. Sebab, tak punya industri besar seperti di Kota Taman maupun Kota Minyak. Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Bernaulus Saragih memperkirakan 2045 Kota Tepian bakal tertinggal.

Saat itu, IKN di Kaltim sudah mulai berjalan. Artinya persaingan dan geliat ekonomi sudah berjalan dengan berbagai perubahan. Namun, yang membuat ketertinggalan makin jauh adalah pola pikir alias *mindset*. Diakuinya, saat ini masyarakat Samarinda pun sebenarnya belum siap. “Kalau *mindset*-nya masih lokal, ya susah. *Mindset*-nya harus maju,” ucap Bernaulus usai acara diskusi di Samarinda kemarin (21/12).

Di sisi lain, Balikpapan yang akan banyak diuntungkan dengan keberadaan IKN. Secara geografis, kota ini yang paling dekat dengan ibu kota yang baru. Selain itu, Balikpapan punya perusahaan besar seperti Pertamina. Sebuah hal yang tak dimiliki Samarinda. Sedangkan Bontang, punya perusahaan seperti Pupuk Kaltim dan Badak LNG. Perusahaan besar ini menjadi modal jumbo dan daya tarik ekonomi suatu kota. Anggota Dewan Pakar Nasdem Teuku Taufiqulhadi mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. “Pidato Presiden RI di MPR soal pemindahan Ibu Kota RI ke Kalimantan sudah merupakan keputusan final dan mengikat. Kami sangat mendukung karena dengan alasannya adalah untuk pemerataan pembangunan,” kata Taufiq kepada Okezone, Sabtu (17/8/2019)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, *Komisi II Bentuk Panja Pemindahan IKN*, hlm. 1 dan 7, 11 Januari 2020
2. Kaltim Post, *Tak Berbenah, 2045 Samarinda Tertinggal*, hlm. 1, 22 Desember 2019
3. <https://nasional.okezone.com/read/2019/08/17/337/2093097/nasdem-pemindahan-ibu-kota-sudah-final-kami-dukung>, *Nasdem: Pemindahan Ibu Kota Sudah Final, Kami Dukung*, diakses Kamis, 16 Januari 2020, pukul 13.36 wita

Catatan:

- Groundbreaking adalah sebuah acara peresmian atau lebih tepatnya sebuah acara peletakan batu pertama yang dilakukan dalam sebuah proyek /pembangunan. Bila diterjemahkan secara langsung dari bahasa Inggris, maka groundbreaking artinya “mencangkul”
- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi II DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu
- Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang disusun oleh DPR dan Pemerintah.
- Pidato Presiden tanggal 16 Agustus di depan DPR RI merupakan bentuk hukum tidak tertulis yang disebut Konvensi. Tak ada aturan yang tertulis mewajibkan ini dilaksanakan.

Namun, praktik ini secara terus menerus dilaksanakan, sehingga dianggap sebagai konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan.

- Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
- Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
 - c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
 - d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau
 - e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat